



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

# **PROGRAM DAN KEGIATAN DIREKTORAT KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA**

**OLEH**

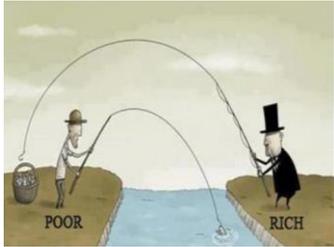
**Drs. La Ode Ahmad, M.Si**

**DIREKTUR KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA  
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM**

**KEPULAUAN RIAU, 16 NOVEMBER 2020**

# POTENSI DAN ANCAMAN

## Atas Keberagaman dan Disparitas Bangsa



KERENTANAN EKONOMI



Masalah sosial kemasyarakatan



KECEMBURUAN SOSEK



Keberagaman budaya



Gangguan kerukunan umat beragama

## Peran strategis Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Perumusan Kebijakan

Pelaksanaan Kebijakan

Koordinasi, kerjasama Pelaksanaan Kebijakan

Pembinaan Pengawasan

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan



# ISU-ISU STRATEGIS KETAHANAN EKONOMI

## ISU STRATEGIS

1. MENGUATNYA TREND PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN EKONOMI SYARIAH DLM BERBAGAI SEKTOR;
2. BELUM OPTIMALNYA PERANAN ZAKAT DALAM PENGUATAN KETAHANAN EKONOMI NASIONAL;
3. MELUNTURNYA DAN TERDEGRADASINYA KONSEP NASIONALISME EKONOMI;
4. BELUM TERSENTUHNYA SECARA KOMPRESHENSIF LANGKAH- LANGKAH STRATEGIS DALAM PEMEBERDAYAAN KETAHANAN EKONOIM MASYARAKAT KORBAN SEPARATIS DAN KONFLIK;
5. MATISURINYA KOPERASI;
6. BELUM ADANYA AFIRMASI KEBIJAKAN DAERAH MENDORONG KETAHANAN EKONOMI DAN IKLIM INVESTASI
7. MINIMNYA TRADISI PEMBERIAN “PERHATIAN DAN PENGHARGAAN” BAGI PEMDA (ROLE MODEL), BIDANG EKONOMI

## PENDEKATAN

1. TEMATIK
2. LOKUS (OBEYK & SUBYEK)  
KEWILAYAHAN
3. LEVEL EKONOMI



# ORIENTASI PENGEMBANGAN PROGRAM KERJA 2021-2024

1



**MENYIAPKAN KONSEP RANCANGAN REGULASI YANG TERKAIT DENGAN PENINGKATAN KETAHANAN EKONOMI DAERAH**

2



**MENYUSUN INDEKS KETAHANAN EKONOMI DAERAH DAN INDEKS SOSBUD (LANGKAH AWAL DENGAN MELAKUKAN KAJIAN-KAJIAN DAN PENJAJAGAN DENGAN MENGGUNAKAN DATA SKUNDER DARI BI, BPS & LEMBAGA KAJIAN)**

3



**MENYELENGGARAKAN FORUM-FORUM PERTEMUAN/KAJIAN (SEBAGAI WADAH PEMBAHASAN TEMATIK: POLITIK-IDEOLOGI EKONOMI, INTELIJEN-KEAMANAN EKONOMI, DAN SOSIAL EKONOMI)**

4



**MENYIAPKAN SATU KEGIATAN “ICONIK” YANG DAPAT DIDORONG MENJADI *PROGRAM PRIORITAS NASIONAL*. DI DALAMNYA ADA UNSUR: PEMERINTAH, PELAKU USAHA, DAN MASYARAKAT PEMBAHASAN PROBLEM-PROBLEM EKONOMI-KESEJAHTERAAN AKTUAL DI DAERAH**

5



**MENJALIN KEMITRAAN-STRATEGIS DENGAN LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL/LEMBAGA AMAL (ORMAS/LSM/NGO) DAN PELAKU USAHA DALAM RANGKA **PEMBERDAYAAN KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT KORBAN SEPARATISME, RADIKALISME-TERORISME DAN KONFLIK** SEPERTI DI ACEH, MALUKU, PAPUA, DAN PAPUA BARAT**



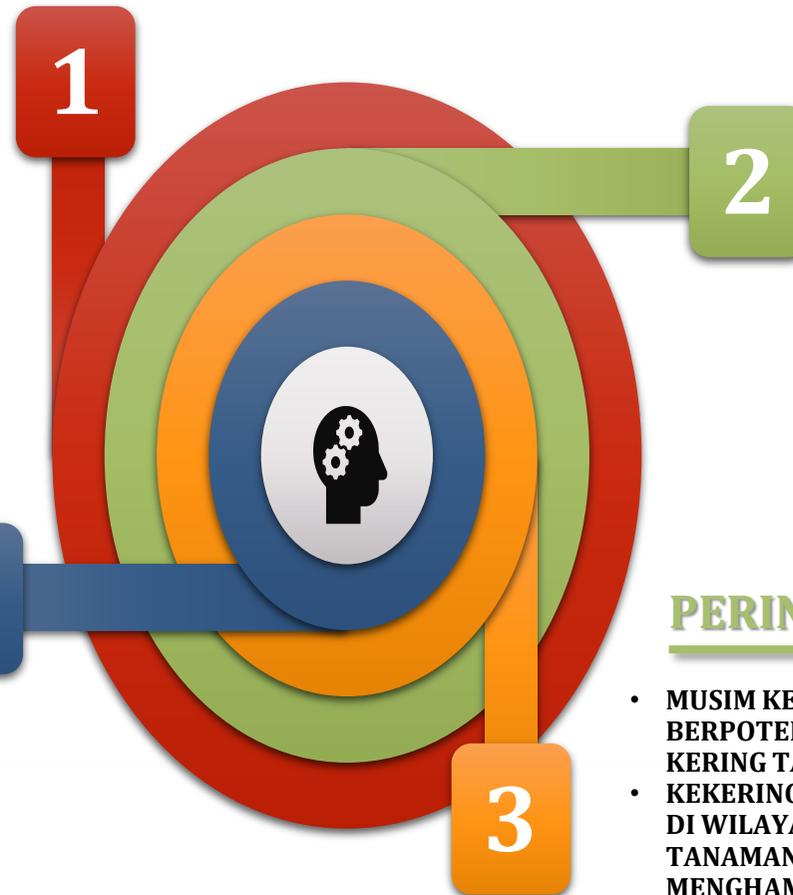
## ISU - ISU STRATEGIS

### FAKTA

- TIDAK ADA YANG MEMASTIKAN KAPAN PANDEMI COVID 19 BERAKHIR
- BELUM DITEMUKAN VAKSIN PENGOBATAN COVID 19 DAN MEMERLUKAN WAKTU YANG LAMA

### ASPEK HANKAM

JIKA DALAM SUATU NEGARA TERJADI KERAWANAN PANGAN MAKA KESTABILAN EKONOMI, POLITIK DAN SOSIAL AKAN TERGUNCANG



### PERINGATAN FAO

- PANDEMI COVID 19 MEMICU KRISIS PANGAN DUNIA
- PEMBERLAKUAN KARANTINA WILAYAH (LOCKDOWN) DAN PEMBATASAN SOSIAL SANGAT MEMENGARUHI SEKTOR PERTANIAN
- SETIAP NEGARA MENJAGA KELANCARAN RANTAI PASOKAN MAKANAN MASING-MASING

### PERINGATAN BMKG

- MUSIM KEMARAU BERPOTENSI LEBIH KERING TAHUN INI
- KEKERINGAN EKSTREEM DI WILAYAH PENGHASIL TANAMAN AKAN MENGHAMBAT KETERSEDIAAN PANGAN NASIONAL



ISU

KETAHANAN  
SOSIAL

PENYAKIT  
MASYARAKAT

PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
DAN PREKURSOR NARKOTIKA

MENINGKATNYA KEKERASAN PADA PEREMPUAN  
DAN ANAK

AKSI PREMANISME

PEREDARAN GELAP DAN KONSUMSI MINUMAN KERAS

MARAKNYA LGBT DI KALANGAN KAUM MILENIAL

PRESIDEN  
TELAH  
MENETAPKAN  
INDONESIA  
SEBAGAI  
**DARURAT  
NARKOBA**

- **2017, terdapat 3.376.115 pengguna narkoba, yang setiap harinya 40-50 orang meninggal dunia akibat penyalahgunaan narkoba**
- **2018, meningkat menjadi 3.801.529 pengguna narkoba**
- **2019 mengalami kenaikan angka prevalensi sebesar 0,03**



Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas  
Pencegahan dan Pemberantasan  
penyalahgunaan dan Peredaran Gelap  
Narkotika dan Prekursor Narkotika;

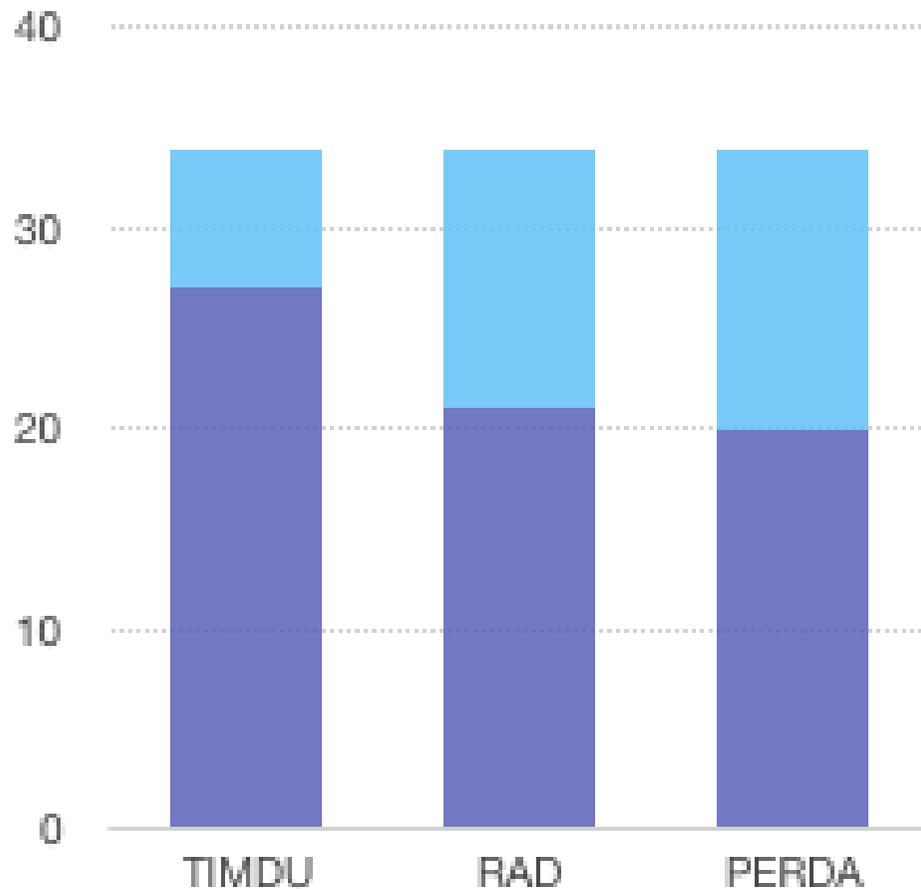
Instruksi Presiden Nomor  
6 Tahun 2018 tentang  
Rencana Aksi P4GN dan  
Inpres 2 /tahun 2020  
tentang P4GN

# DATA IMPLEMENTASI P4GN DAN PN **PROVINSI**



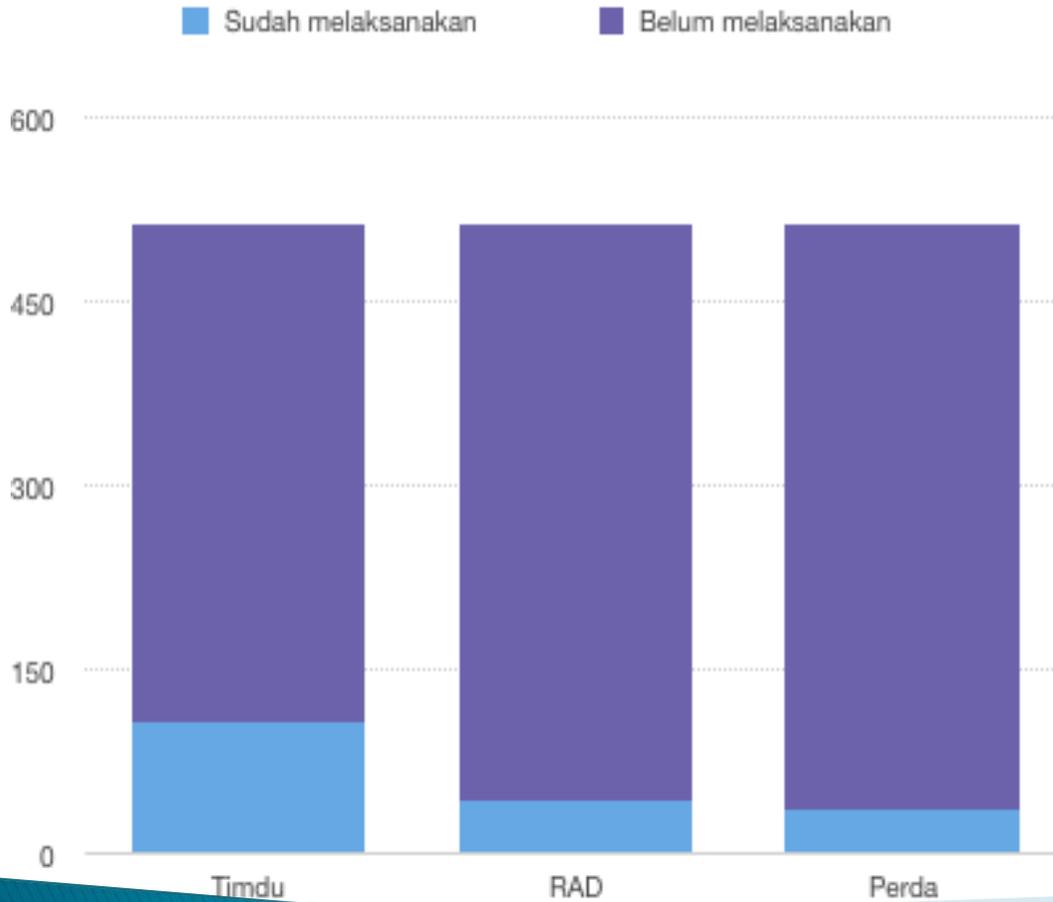
DATA S.D. 15 NOVEMBER 2020  
Implementasi Permendagri 12/2019

IMPLEMENTASI PROVINSI	TIMDU	RAD	PERDA
SUDAH MELAKSANAKAN	27	22	20
BELUM MELAKSANAKAN	7	12	14



■ BELUM MELAKSANAKAN  
■ SUDAH MELAKSANAKAN

# IMPLEMENTASI P4GN DAN PN KAB/KOTA BERDASARKAN PERMENDAGRI 12/2019



DATA S.D. 15 NOVEMBER 2020  
Implementasi Permendagri 12/2019

IMPLEMENTASI KAB/KOTA	Timdu	RAD	Perda
Sudah melaksanakan	109	44	37
Belum melaksanakan	405	470	477

# RENCANA AKSI BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN TAHUN 2021

INDIKATOR INDEKS KETAHANAN  
SOSIAL KEMASYARAKATAN

- INDIKATOR INDEKS KETAHANAN SOSMASY
- PENGUATAN KEBIJAKAN INDEKS GARTA
- PENYUSUNAN JUKNIS
- PENGUATAN SISTEM BERBASIS APLIKASI IMPLEMENTASI INDEKS KETAHANAN SOSIAL

IMPLEMENTASI PERMENDAGRI 12/2019,  
MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN P4GN DAN PN

- MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN PEMDA SECARA BERKALA
- PENYUSUNAN JUKNIS PELAPORAN P4GN DAN PN
- PENGUATAN PELAPORAN P4GN DAN PN MELALUI SISTEM BERBASIS APLIKASI

FASILITASI PENANGANAN MASALAH  
SOSIAL KEMASYARAKATAN

- SINERGITAS DENGAN K/L TERKAIT FASILITASI DENGAN PEMDA
- MELAKSANAKAN FORUM KOORDINASI ANTAR K/L DAN PEMERINTAH DAERAH

GERAKAN HARMONI SOSIAL  
KEMASYARAKATAN

- PELAKSANAAN FORUM UNTUK MENINGKATKAN GERAKAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
- PELIBATAN UNIVERSITAS, ORMAS DAN LEMBAGA NON PEMERINTAH

# INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA TAHUN 2019

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA



## HASIL

Indeks KUB rata-rata nasional:  
**73,83** (tinggi)

Kebencian menjadi faktor dominan  
yang memengaruhi indeks KUB  
rendah di beberapa daerah



## DIMENSI KUB

Toleransi: **72,37**

Kesetaraan: **73,72**

Kerja sama antara umat  
beragama: **75,40**

**Skors Indeks KUB di Atas Rata-rata Nasional**

Papua Barat	82,1
Nusa Tenggara Timur	81,1
Bali	80,1
Sulawesi Utara	79,9
Maluku	79,4
Papua	79,0
Kalimantan Utara	78,0
Kalimantan Tengah	77,8
Kalimantan Barat	76,7
Sumatera Utara	76,3
Sulawesi Selatan	75,7
Sulawesi Tengah	75,0
Jawa Tengah	74,6
DI Yogyakarta	74,2
Sulawesi Barat	74,1
Sulawesi Tenggara	73,9



Jawa Timur	73,7
Kalimantan Timur	73,6
Gorontalo	73,2
Kep. Bangka Belitung	73,1
Lampung	73,1
Kepulauan Riau	72,8
Maluku Utara	72,7
Kalimantan Selatan	72,5
Sumatera Selatan	72,4
Bengkulu	71,8
DKI Jakarta	71,3
Jambi	70,7
NTB	70,4
Riau	69,3
Banten	68,5
Jawa Barat	68,9
Sumatera Barat	64,4
Aceh	60,2

**Skors Indeks KUB di Bawah Rata-rata Nasional**

Sumber Data : Seminar Launching Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2019, Kementerian Agama

Kementerian Dalam Negeri

## PERSENTASE PEMBENTUKAN FKUB SE-INDONESIA

DAERAH	JUMLAH	SUDAH TERBENTUK	BELUM TERBENTUK	%
<b>PROVINSI</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>-</b>	<b>100 %</b>
<b>KOTA</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>-</b>	<b>100 %</b>
<b>KABUPATEN</b>	<b>416</b>	<b>412</b>	<b>4</b>	<b>98,85 %</b>

SUMATERA BARAT (2)

- a. Kab. Tanah Datar
- b. Kab. Pesisir Selatan

PAPUA (2)

- a. Kab. Puncak Jaya
- b. Kab. Nduga

# Data Pembentukan FKUB Daerah Tahun 2019

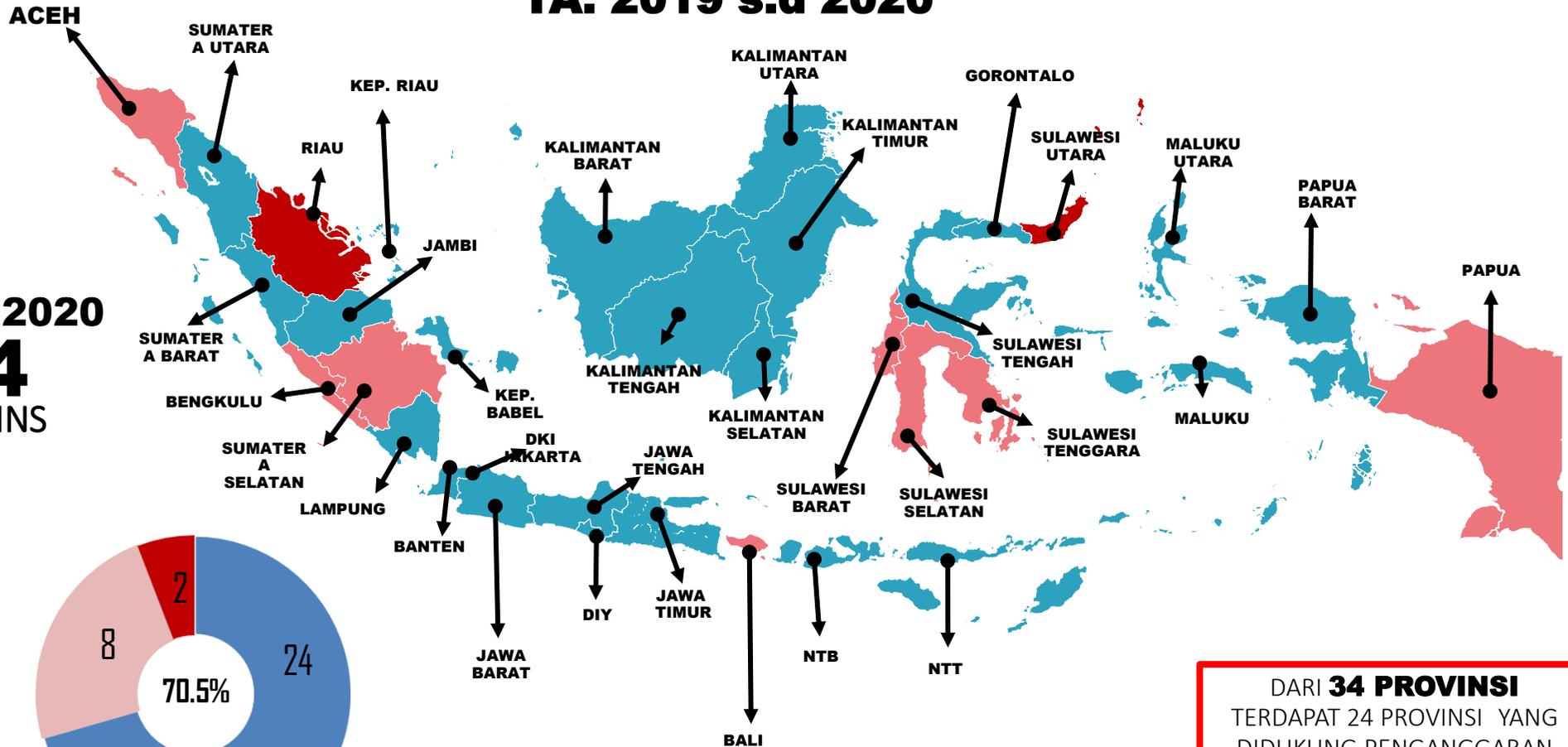
DATA FKUB TAHUN 2019

NO	PROVINSI	FKUB PROVINSI	GEDUNG SEKBER FKUB PROVINSI	JUMLAH KAB/KOTA	FKUB KAB/KOTA YG SUDAH TERBENTUK	FKUB KAB.KOTA YG BELUM TERBENTUK	FKUB KAB.KOTA YG SUDAN MEMILKI GEDUNG SEKBER	FKUB KAB/KOTA YG BELUM MEMILIKI GEDUNG SEKBER	KETERANGAN (FKUB YG BELUM TERBENTUK)
1	Aceh	1	1	23	23	0	6	17	
2	Sumatera Utara	1	1	33	33	0	6	27	
3	Sumatera Barat	1	1	19	17	2	3	16	1. Kab. Pesisir Selatan 2. Kab. Tanah Datar
4	Riau	1	1	12	12	0	2	10	
5	Kepulauan Riau	1	1	7	7	0	2	5	
5	Jambi	1	1	11	11	0	3	8	
7	Sumatera Selatan	1	1	17	17	0	6	11	
8	Bangka Belitung	1	1	7	7	0	4	3	
9	Bengkulu	1	0	10	10	0	6	4	
10	Lampung	1	1	15	15	0	5	10	
11	Banten	1	1	8	8	0	5	3	
12	DKI Jakarta	1	0	6	6	0	0	6	
13	Jawa Barat	1	0	27	27	0	0	27	
14	Jawa Tengah	1	1	35	35	0	13	22	
15	DI Yogyakarta	1	1	5	5	0	4	1	
16	Jawa Timur	1	0	38	38	0	1	37	
17	Bali	1	1	9	9	0	4	5	
18	NTB	1	1	10	10	0	5	5	
19	NTT	1	1	22	22	0	7	15	
20	Kalimantan Barat	1	1	14	14	0	9	5	
21	Kalimantan Tengah	1	1	14	14	0	10	4	
22	Kalimantan Selatan	1	1	13	13	0	2	11	
23	Kalimantan Timur	1	1	10	10	0	4	6	
24	Kalimantan Utara	1	1	5	5	0	1	4	
25	Sulawesi Utara	1	1	15	15	0	4	11	
26	Gorontalo	1	1	6	6	0	3	3	
27	Sulawesi Tengah	1	1	13	13	0	8	5	
28	Sulawesi Tenggara	1	1	17	17	0	1	16	
29	Sulawesi Selatan	1	1	24	24	0	9	15	
30	Sulawesi Barat	1	1	6	6	0	4	2	
31	Maluku	1	1	11	11	0	10	1	
32	Maluku Utara	1	1	10	10	0		10	
33	Papua	1	1	29	27	2	7	20	1. Kab. Puncak Jaya 2. Kab. Nduga
34	Papua Barat	1	1	13	13	0	10	10	
	JUMLAH	34	29	514	510	4	164	352	



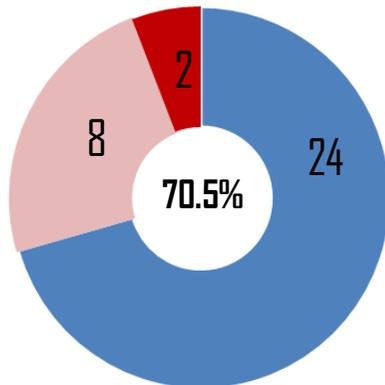
# PENGANGGARAN FKUB DARI APBD PROVINSI TA. 2019 s.d 2020

FKUB 2020  
**34**  
PROVINSI



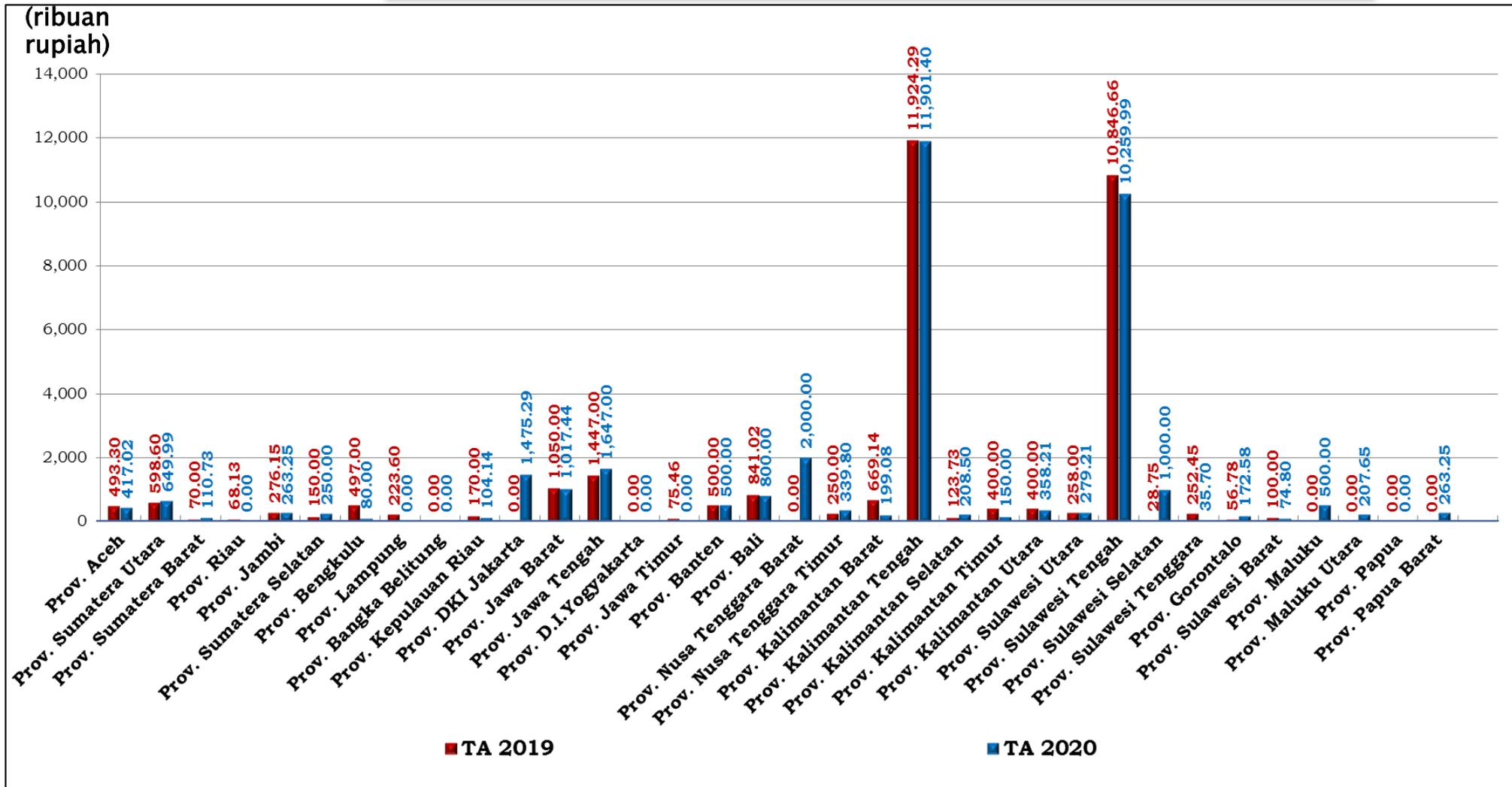
## KETERANGAN

- ANGGARAN TERSERAP
- REFOCUSING COVID-19
- TIDAK DIANGGARKAN DALAM APBD



DARI **34 PROVINSI**  
TERDAPAT 24 PROVINSI YANG  
DIDUKUNG PENGANGGARAN  
FKUB OLEH APBD (**70.5%**)

# ALOKASI ANGGARAN UNTUK FKUB APBD PROVINSI SE-INDONESIA TA 2019 s.d 2020



Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2020

# SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENDANAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DALAM APBD



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 Januari 2017

Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Provinsi  
2. Sdr/i. Bupati/Walikota  
di-  
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR: 905/117/3

TENTANG

PENDANAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya konflik sosial bernuansa agama dan upaya meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama di daerah dan sebagai implementasi Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dengan ini diminta perhatian Saudara/i atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, menyatakan bahwa:
  - a. belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi didanai dari dan atas beban APBD Provinsi.
  - b. belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota didanai dari dan atas beban APBD Kabupaten/Kota.

-2-

2. Schubungan dengan hal tersebut, pendanaan bagi FKUB dapat dianggarkan dalam APBD melalui belanja hibah dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD serta peraturan perundang-undangan lain di bidang keuangan daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan:

1. Yth. Presiden Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Yth. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; dan
4. Yth. Menteri Agama Republik Indonesia.



## ARAH KEBIJAKAN AGAMA DAN KEPERCAYAAN 2020-2024

- Meningkatkan pemahaman beragama masyarakat yang berwawasan kebangsaan;
- Penguatan dan pemberdayaan Forum kerukunan Umat Beragama
- Pemberdayaan dan kerjasama organisasi kemasyarakatan dalam menjaga kerukunan umat beragama.
- Penguatan regulasi kehidupan beragama.
- Peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.



## PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA DAMPAK PANDEMI COVID-19

**SECARA SOSIOLOGIS, PANDEMI COVID-19 TELAH MENYEBABKAN PERUBAHAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN. ARTINYA, PERUBAHAN SOSIAL YANG TERJADI SECARA SPORADIS DAN TIDAK DIKEHENDAKI KEHADIRANNYA OLEH MASYARAKAT. AKIBATNYA, KETIDAKSIAPAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI PANDEMI INI PADA GILIRANNYA TELAH MENYEBABKAN DISORGANISASI SOSIAL DI SEGALA ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT.**

**PANDEMI COVID-19 (CORONAVIRUS DISEASE 2019) MEMBENTUK KESADARAN BARU DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN SEPERTI KESEHATAN, EKONOMI, BUDAYA, SOSIAL POLITIK HINGGA KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN.**



**SEJUMLAH TATA NILAI DAN NORMA LAMA HARUS DITATA ULANG DAN DIREPRODUKSI KEMBALI UNTUK MENGHASILKAN SISTEM SOSIAL BUDAYA YANG BARU**

**SEBAB PANDEMI COVID-19 TELAH MENGINFEKSI SELURUH ASPEK TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SELAMA INI TELAH DIINTERNALISASI SECARA TERLEMBAGA MELALUI RUTINITAS YANG TERPOLA DAN BERULANG.**



# PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA DAMPAK PANDEMI COVID-19

9



## Program dan Kegiatan Tahun 2020

## Program dan Kegiatan Tahun 2021

Pencegahan dan Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan

**Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Terkait Pelayanan Terhadap Penghayat Kepercayaan**

Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika

**Pencegahan Dan Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Dan Prekursor Narkotika**

Forum Dialog Revitalisasi Pasar Tradisional dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi daerah

**Pencegahan dan Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan**

Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Syariah Dilingkungan Pondok Pesantren

**Penguatan Ketahanan Ekonomi Daerah Pasca Pandemi Covid-19**

Komunikasi Sosial dan Pembahasan Isu-isu strategis bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya

**Komunikasi Sosial dan Pembahasan isu-isu strategis bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya**

Pemantapan Ketahanan Seni dan Budaya dalam Upaya memperkuat Integrasi Bangsa

**Penguatan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal untuk Membangun Karakter Bangsa pada Generasi Muda Dalam mendukung pencapaian Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya**

<p>Fasilitasi Daerah dalam Penguatan Penanganan Kesenjangan Ekonomi dalam Upaya memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Daerah Rawan Konflik</p>	<p><b>Penguatan Peran Pemda Dalam Fasilitasi Dewan Kesenian Daerah, Budayawan, Seniman Lembaga Adat Dan Ormas Bidang Budaya</b></p>
<p>Fasilitasi Daerah dalam Penguatan Penanganan Rawan Pangan dalam Upaya memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Daerah Rawan Konflik</p>	<p><b>Fasilitasi Daerah dalam Penguatan Penanganan Kesenjangan Ekonomi dalam Upaya memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Daerah Rawan Konflik dan mendukung peningkatan indeks ketahanan nasional gatra ekonomi</b></p>
<p>Kreatifitas Vlog Budaya Tradisi Nusantara dalam rangka memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa</p>	<p><b>Fasilitasi Daerah dalam Penguatan Penanganan Rawan Pangan dalam Upaya memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Daerah Rawan Konflik dan mendukung peningkatan indeks ketahanan nasional gatra ekonomi</b></p>
<p>Workshop Gerakan Nasionalisme Tentang Cinta Produk Dalam Negeri</p>	<p><b>Kampanye Nasionalisme Cinta Produk Dalam Negeri</b></p>
<p>Penguatan dan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama</p>	<p><b>Kerukunan umat beragama di daerah</b></p>
<p>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pelayanan Terhadap Penghayat Kepercayaan</p>	<p><b>Penguatan dan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama</b></p>



TERIMAKASIH